BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini umat Islam sering dipandang sebelah mata didalam menghadapi masalah perekonomian karena dalam kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun ekonomi. Padahal umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan masalah ekonomi bangsa. Dengan kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk, secara tidak langsung umat Islam lah yang merasakannya, itulah realitasnya.

Karena dalam membangun ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan solusi agar dapat keluar dari keterpurukkan ekonominya. Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Itulah fenomena yang menegaskan betapa sulitnya mencari solusi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Kemiskinan yang melanda hampir diseluruh wilayah indonesia merupakan akibat dari kurang optimalnya kebijakan pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan di masyarakat. Dalam mengatasi kemiskinan tersebut, Islam mengajarkan syari'at berupa zakat yang diwajibkan kepada umat Islam yang berfungsi untuk meningkatkan rasa kepedulian kepada kaum miskin. Oleh karena itu zakat bisa berperan sebagai solusi dalam pengentasan masyarakat miskin yang mayoritas beragama islam.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana dalam rukun Islam zakat mempunyai dua keterkaitan yaitu habluminallah dan habluminannas. Artinya zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial.¹

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Zakat disamping termasuk ke dalam kategori ibadah mahdhah, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.²

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan

¹Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.20. (Asnani menerangkan bahwa dalam bukunya, zakat ialah rukun Islam yang merupakan satu-satunya Ibadah yang mempunyai dua keterkaitan, penulis kurang sependapat dengan Asnani)

²Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: GemaInsani, cet. Ke-3, 2009, hal.104.

pernah berhenti, artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis danyang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.³

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan Produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat dikarenakan Lembaga Amil Zakat mempunyai peranan penting dalam hal pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, Badan Amil tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

LAZ Rumah zakat melalui optimalisasi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh serta sumber yang lainnya mengajak responden untuk bergabung di dalam merangkai senyum indonesia melalui program pengelolaan zakat terpadu. Tujuan gerakan

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 189-190.

ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mengelola zakat melalui potensi diri dan lingkungannya secara mandiri.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa berkurang, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Namun Kemiskinan selalu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah kita, tapi pekerjaan itu tidak pernah di prioritaskan untuk mengurangi angka Kemiskinan, padahal tingkat ekonominya masih banyak yang dibawah rata-rata. Tak heran jika kita sering melihat Gelandangan, Pengemis atau yang lain berkeliaran dijalanan Ibukota Jakarta bahkan tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam mengatasi kemiskinan membutuhkan waktu yang lama sehingga perlu dilakukan penanganan secara sistematis dan fokus oleh antar sektor dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Di satu sisi sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim itu peran pendayagunaan zakat apakah mampu membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Zakat Produktif dapat diartikan sebagai upaya dalam pendistribusian dana zakat kepada para Mustahiq (Penerima Zakat) dengan cara yang produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik akan membahas mengenai peran dan fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan judul “ **Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Zakat produktif menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di BAZNAS Demak?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak?
3. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya pelaksanaan program zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BAZDA Kabupaten Demak .
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kegiatan Pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak.
3. Untuk Mengetahui Permasalahan yang Dihadapi BAZDA Kabupaten Demak dalam Pelaksaaan zakat Produktif.

⁴*Ibid* hlm. 134

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk :

1. Pemahaman masyarakat tentang Badan Amil Zakat
2. Pemantapan eksistensi Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh Negara dan Masyarakat dalam upaya membantu mengatasi masalah sosial ekonomi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Badan Amil Zakat Daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. Terminologi

1. Pengertian Zakat dari segi Terminologi Islam terdapat beberapa definisi :

- a. Menurut Nawawi

Zakat adalah sesuatu tertentu dari harta tertentu pula untuk kemudian diberikan kepada golongan tertentu.

- b. Menurut asy- Syarwani dan Zain ad-Din al-Malibari

Zakat ialah sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan jiwa pada waktu yang ditentukan.

- c. Asy-Syaukani

Mengemukakan bahwasannya Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dari nisab untuk diberikan kepada fakir atau lainnya yang berhak menerimanya.

Dari ketiga definisi Zakat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya Zakat secara Umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau harta benda) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada Mustahiq dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahunnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam agama Islam (fiqh Islam) Zakat dapat meliputi segala bentuk harta kekayaan yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau Mustahiq Zakat dengan harapan dapat mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala serta dapat mensucikan jenis dari kekikiran dosa oleh si Muzakki (orang yang mengeluarkan Zakat).⁵ Zakat menurut Syara' diartikan di dalam dua pengertian yakni, yang pertama Zakat diharapkan mendatangkan pahala. Kedua, Zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁶ Sedangkan Zakat menurut Etimologi adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah.

Secara terminologi zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Al-Qur'an disebut kalangan fakir miskin dan Mustahiq lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNYA, serta untuk membersihkan diri dari hartanya.

Menurut Imam Maliki dalam mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah

⁵Mu'inan Fafi, *Potensi Zakat*, Jakarta: Yayasan Cendekia press,2018, hal. 3

⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra,2009, hal.3.

mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Menurut Maddzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan Madzhab Hambali mengatakan bahwa Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁷

2. Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa definisi dari Pengelolaan Zakat ialah suatu upaya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya tujuan zakat dapat tercapai dengan adanya pengelolaan serta pemberdayaan zakat pada masyarakat miskin.

3. Zakat produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari Kamus Besar Bahasa Inggris (KBBI) yaitu dari kata "Productive" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga. Secara umum produktif berarti menghasilkan banyak karya dan barang. Sehingga dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq(penerima zakat) tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan

⁷Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1995.

dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka secara terus-menerus.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

4. Definisi BAZNAS

BAZNAS(Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Demak adalah lanjutan dari BAZIS yang terbentuk terlebih dahulu. BAZIS Kabupaten Demak, telah terbentuk pada bulan April 1990 sesuai Surat Keterangan Bupati Nomor 451/12/149A/1990 seiring telah diberlakukannya Undang-Undang NO 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat maka kemudian BAZIS di Kabupaten Demak berubah menjadi BAZ Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/744/2006. BAZDA Kabupaten Demak merupakan program lanjutan dari BAZIS Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh. Perubahan anam dari BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan agar Zakat, infaq dan sedekah mendapat perhatian lebih dari semua pihak dan pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga yang terkait.

Pada bulan Februari lalu Tahun 2016, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak beralih menjadi Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Demak. Letak perbedaan dari BAZDA dan BAZNAS adalah dari penggunaan peraturan perundang-undangannya yaitu BAZDA menggunakan peraturan pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan dialihkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yaitu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁸

5. Upaya Pengelolaan Zakat

Upaya Pengelolaan Zakat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam penyelesaian permasalahan mengenai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.

Upaya pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan dalam bentuk upaya pengelolaan zakat secara produktif yaitu dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha kepada masyarakat miskin supaya mereka / fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kebutuhan hidupnya dengan konsisten. Dengan dana zakat tersebut yang diberikan kepada masyarakat miskin secara produktif akan berpengaruh terhadap meningkatnya usaha serta pengembangan usaha mereka, serta mereka juga dapat menyisihkan penghasilan yang di dapatkannya untuk menabung.

6. Penanggulangan Kemiskinan

⁸Profil BAZNAS Demak

Kemiskinan adalah kondisi sosial masyarakat dimana mereka tidak mempunyai kemampuan didalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kemiskinan merupakan keadaan masyarakat atau sebagian masyarakat yang hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Sehingga BAZNAS memiliki upaya dalam penanggulangan Kemiskinan yang terjadi dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin / masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara menjadikan dan memberikan dana zakat itu sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin dengan pendampingan dan pengawasan dari petugas BAZNAS secara langsung.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*.⁹Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada *ilmu hukum* tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum bagi suatu kasus *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu kasus tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan. Berdasarkan hal tersebut, maka

⁹Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal.106.

penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*¹⁰ yaitu mengumpulkan data lapangan yang berhubungan dengan informasi-informasi tentang aplikasi mekanisme dan prosedur pelaksanaan zakat produktif dalam penanggulangan kemiskinan pada BAZDA Kabupaten Demak dan beberapa informasi mengenai strategi yang digunakan dalam mengatasi kemungkinan resiko yang dapat terjadi, untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan berpegang pada segi yuridis.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis, yang dalam pelaksanaannya metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan/implementasi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Demak terhadap kemiskinan yang disertai dengan problematikannya untuk kemudian dianalisis lebih lanjut dan diamati bagaimana persiapan dan langkah-langkah yang harus dijalankan, juga kendala atau hambatan yang perlu diperhitungkan yang mungkin muncul, sekaligus solusinya.

a. Interview(wawancara)

¹⁰Soejono dan Abdur Rohman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenika Cipta, 2003, hal.22.

Adalah kegiatan pengumpulan data primer yang langsung dari responden penelitian dilpangan (lokasi). Interview (wawancara) dapat dilakukan secara informal (santai) dapat pula ssecara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Interview (wawancara) *informal* dapat dilakukan terhadap responden biasa, seperti petani atau kelompok masyarakat yang tidak terkait dengan protokoler, sedangkan interview(wawancara) *formal* dapat dilakukan oleh sikap, pengetahuan, ataupun pengalaman pewawancara, melainkan juga tergantung pada pengalaman responden, serta situasi dimana wawancara dilakukan, pertanyaan yang diajukan pewawancara, dan lamanya waktu wawancara yang disediakan.

Studi Interview(wawancara) ini dilakukan oleh penulis terhadap pengelola dan orang-orang yang terlibat langsung didalam panitia dan kepengurusan Laziz baik pimpinan maupun stafnya, bahkan terhadap Mustahiq dan Muzakki, untuk mendapatkan data dalam mendiskripsikan tentang aplikasi pendistribusian.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum dilokasi. Terdapat 2 jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1) Observasi prapenelitian berupa peninjauan dilapangan dan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.

2) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini menurut para ahli sangat relevan pada penelitian suatu kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif. Teknik ini akan penulis gunakan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran langsung di lapangan terhadap aplikasi pengelolaan zakat melalui pengelola Laziz maupun melalui Mustahiq atau Muzakki.

3. Metode pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, disamping spesifikasi penelitian tersebut diatas penulis juga menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum atau yang lain yang berasal dari bagian sumber dan dipublikasikan secara luas

serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.¹¹ Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

Pembuatan undang-undang tentang Laziz, produk hukumnya disebut perundang-undangan.

- 1) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi)
- 2) Para pihak berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
- 3) Penulis hukum produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- 4) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum.
- 5) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Studi pustaka ini akan penulis gunakan untuk menerangkan hal-hal yang ada kaitannya dengan pembahasan tentang gambaran umum tentang Lembaga Amil Zakat dan shodaqoh serta tentang pembahasan Mustahiq zakat dan ketentuan hukumnya.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, praktisi hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di pusat

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2004, hal.125.

informasi dan dokumentasi hukum yang ada di lembaga-lembaga Negara. Lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum, atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Misalnya transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹²

Studi dokumen ini akan penulis gunakan untuk mendapatkan paparan yang jelas khususnya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan aplikasi pengelolaan zakat dalam pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Demak.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisa Data yang akan digunakan oleh penulis antara lain menggunakan studi *kualitatif*.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada individu tersebut secara holistik (utuh).¹³

Terhadap peraturan dan data yang diperoleh dari masyarakat atau pejabat yang ada akan dianalisis secara kualitatif. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Pelaksanaan Zakat Produktif dalam mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan

¹²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2006, hal. 231.

¹³Desy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosda Karya, 2002, hal. 03.

Sebagai upaya untuk mempermudah penulis atau pembaca dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri atas enam sub bahasan, pertama memuat mengenai Latar Belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam Latar Belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, terminologi berisi tentang pengertian Zakat secara luas dari pendapat para ahli. Kelima, metode penelitian, metode penelitian meliputi : spesifikasi penelitian , sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Keenam, sistematika penulisan, sistematika penulisan merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri atas dua sub bahasan **Tinjauan Umum Zakat** yang memuat: pertama, pengertian zakat. Kedua, jenis-jenis zakat. Ketiga syarat kekayaan wajib zakat. Keempat, harta yang wajib dizakati. Kelima, tujuan dan Hikmah zakat. **Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan.**

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN mengenai sistem pengelolaan zakat di BAZDA Kabupaten Demak, Bagaimana upaya pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan

kemiskinan yang dilakukan BAZDA Kabupaten Demak. Serta bagaimana problematika dan penyelesaiannya yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Demak.

BAB IV: PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.